

**KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN  
WISATA BAHARI PANTAI BATU KASAH DI DESA CEMAGA  
TENGAH KECAMATAN BUNGURAN SELATAN  
KABUPATEN NATUNA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh:**

**ARDIANTI**

**NIM : 120563201102**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2016**

# **KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI PANTAI BATU KASAH DI DESA CEMAGA TENGAH KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA**

**Oleh : ARDIANTI**

## **ABSTRAK**

Pantai Batu Kasah adalah salah satu wisata bahari yang ada di Natuna. Pantai ini terletak di Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan. Wisata bahari pantai batu kasah ini memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum nampak pengelolannya sebagai daya tarik tersendiri untuk pengunjung atau wisatawan seperti belum terlihat adanya bangunan-bangunan infrastruktur dan penyediaan sarana-prasarana penunjang lainnya, yaitu diantaranya belum tersedia transportasi khusus, fasilitas-fasilitas lainnya seperti gerbang masuk, pondok-pondok tempat pengunjung beristirahat, restoran atau rumah makan, area parkir khusus, tempat ibadah (Masjid), free wifi dan lain sebagainya, apalagi pantai batu kasah yang memiliki pantai yang panjang dan memiliki berbagai macam bentuk terumbu karang ditambah lagi banyak bebatuan besar yang beraneka ragam diujung pantainya yang memberikan pesona tersendiri dari pantai ini, sangat disayangkan apabila wisata seperti ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Natuna khususnya Dinas Pariwisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistic) mengenai uji keabsahan data yang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan teknik-teknik pengambilan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), kebijakan dinas pariwisata untuk menjadikan objek wisata unggulan yang ada di Natuna salah satu nama objek wisata yang masuk dalam kebijakan tersebut adalah objek wisata Pantai Batu Kasah yang ada di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan. Bentuk kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata telah membuat dalam Detile Engenering Desgen (DED) dan kemudian kebijakan Dinas Pariwisata selanjutnya dengan membuat Kelompok Sadar Wisata sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Nomor : 43.a Tahun 2012 dalam hal Penetapan Kelompok Sadar Wisata Pantai Batu Kasah. Yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam perkembangan kepariwisataan dalam suatu wilayah atau tempat.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pengelolaan, Pariwisata.*

## **ABSTRACT**

*Kasah stone beach is one of the marine tourism in Natuna. This beach is located in the Central District of Cemaga Bunguran Village South. Marine tourism stone beach Kasah this has the potential to be developed but not yet seem to manage these as a special attraction for visitors or tourists as yet seen the buildings infrastructure and the provision of infrastructure supporting the other, some of them are not yet available transportasi special, other facilities such as entry gates, lodges where visitors beistirahat, restaurant or restaurant, parking area lodging, places of worship (mosque), free wifi, etc., let alone the rock beach Kasah which has a long coast and have various shapes of coral reefs plus many big rocks are diverse swept beaches provide charm of this beach, it is very unfortunate if such travel is not managed well by the government, especially the Department of Tourism Natuna regency.*

*This study used qualitative research methods. Qualitative research is research that is interpresif (using interpretation) involving many methods, in examining the research. The use of these methods is often called traingulasi-meant that researchers gain a comprehensive understanding (holistic) about the phenomenon that he has examined. To obtain accurate data the author uses the techniques of data collection through observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of the policy implemented by Van Meter dan Van Horn.*

*The results of this study indicate that based on the Strategic Plan (Plan), the department of tourism policy to make the attractions featured in one of the names Natuna attractions are included in the policy are the attractions Kasah stone beach in the village of North Cemaga District of South Bunguran. Shape the policy, the Department of Tourism has made in Detile engenering Desgen (DED) and the policy of the Department of Tourism further by creating a Tourism Awareness Group in accordance with the Decree of the Head of Tourism Natuna District Number: 43.a of 2012 in terms of the Stipulation of beach stones Travel Awareness Group Kasah. One of whose objectives is to increase the capacity, roles, and community initiatives as a subject or a key player in the development of tourism in a region or place.*

*Keywords : Policy, Management, Tourism*

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 2009 : 1-2). Pengelolaan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Pengelolaan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Negara Indonesia

seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat-istiadat, dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beraneka ragam yang berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Selain itu negara Indonesia juga kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah terdahulu dan yang tidak kalah menarik adalah keindahan panorama alamnya yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Oleh sebab itu pengelolaan pariwisata dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Departemen Pariwisata ditingkat nasional dan Dinas Pariwisata Daerah ditingkat daerah.

Menurut Yoeti dalam Primadany (2013:136) Dinas Pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan dan pembinaan kepariwisataan pada umumnya baik tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Sedangkan pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Banyak pariwisata yang harus dikelola oleh pemerintah terutama Dinas Pariwisata seperti pariwisata yang ada di Kabupaten Natuna.

Kabupaten Natuna merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna memiliki tanah yang berbukit dan gunung. Dengan kondisi fisik seperti itu, tidak hayal pesona wisata di Natuna menjadi andalannya. Keberadaan objek wisata pantai-pantai di Natuna yang berpasir putih dan dihiasi batu-batu besar, juga berwarna putih menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Meskipun pengelolaan pariwisata di Pulau Natuna belum terlihat maksimal, tempat wisata di Natuna saat ini sudah mampu memanjakan mata pengunjung ([www.tipsjalan.com](http://www.tipsjalan.com) : diakses pada tanggal 26 januari 2016). Wisata Natuna memiliki potensi dari keindahan alam tersendiri khususnya wisata bahari yang tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat pariwisata di daerah lain yang telah diketahui khalayak umum.

Pantai Batu Kasah adalah salah satu wisata bahari yang perlu dijadikan *listing* bila berkunjung ke Natuna. Pantai ini terletak di Kecamatan Bunguran Selatan. Bentangnya mencapai radius tidak kurang dari 5 km. Hampir seluruh permukaan pantainya diselimuti dengan pasir putih, air yang jernih megiasi biru air laut dikombinasi dengan terumbu karang bermacam-macam bentuk yang membuat wisatawan betah untuk berlama-lama menikmati indanya pantai ini. wisata ini termasuk salah satu tempat yang ramai digemari para wisatawan terutama pada hari-hari libur sabtu dan minggu, wisatawan yang biasa berkunjung saat hari libur berkisar antara 20-50 orang pengunjung selain itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh wisatawan pada wisata bahari seperti ini adalah menyelam (*diving*), *snorkeling*, berselancar (*surfing*), berlayar (*sailing*), bersampan (*boating*), memancing, dan sebagainya. Dari bibir pantai hingga tepian batas air laut ketika

pasang, bentangnya mencapai 10-15 meter. Sementara sisi darat, berdiri ribuan pohon kelapa tinggi menjulang, jadi pagar hidup yang memperindah wajah pantai ini ([www.pariwisata.natunakab.go.id](http://www.pariwisata.natunakab.go.id). diakses pada tanggal 26 januari 2016).

Akan tetapi pantai ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Natuna terutama Dinas Pariwisata pasalnya belum terlihat adanya bangunan-bangunan infrastuktur dan penyediaan sarana-prasarana penunjang lainnya, yaitu diantaranya belum tersedia transfortasi khusus, fasilitas-fasilitas lainnya seperti gerbang masuk, pondok-pondok tempat pengunjung beistirahat, restoran atau rumah makan, area parkir khusus, tempat ibadah (Masjid), free wifi dan lain sebagainya. Seperti halnya wisata Bintan Cabana Resort yang ada di bintang beralamat di Jl. Malang Prapat Km 46 Kecamatan Gunung Kijang yang menyediakan fasilitas seperti pelayanan kamar, restoran, area parkir,

pondok bersantai, *free wifi*, kenyamanan lingkungan, dan area bermain, seperti banana boat, kano, menyelam, Olahraga air, dan lain sebagainya.

Dinas pariwisata dalam hal ini hanya mempromosikan wisata bahari pantai batu kasah bentuk apa adanya masih dalam bentuk alam artinya dinas mempromosikan mengandalkan keindahan pantai dan kejernihan airnya belum adanya daya tarik lain seperti fasilitas pendukung lainnya alat renang seperti yang di jelaskan diatas, hanya sebatas itu saja, sehingga jika dengan adanya pengembangan pembangunan dan sarana lainnya dinas pariwisata bisa mempromosikan wisata ini lebih baik dan di kenal wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan fasilitas yang lebih menarik.

Wisata bahari pantai batu kasah ini memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum nampak pengelolanya sebagai daya tarik

tersendiri untuk pengunjung atau wisatawan seperti halnya Bintang Cabana Resort yang ada di bintang yang memiliki pantai yang tidak terlalu panjang dan memiliki terumbu karang yang tidak begitu banyak, akan tetapi tempat ini telah dikelola dengan baik dan telah dijadikan tempat wisata nan indah dan menarik. Sementara pantai batu kasah yang memiliki pantai yang panjang dan memiliki berbagai macam bentuk terumbu karang ditambah lagi banyak bebatuan besar yang beraneka ragam diujung pantainya yang memberikan pesona tersendiri dari pantai ini, sangat disayangkan apabila wisata seperti ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Natuna khususnya Dinas Pariwisata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kebijakan Dinas Pariwisata dalam mengelola wisata terutama wisata

bahari yang ada di Natuna dengan judul **“Kebijakan Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Batu Kasah di Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna”**.

## 2. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipilih penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif (holistic) mengenai fenomena yang ia teliti. Sesuai dengan prinsip epistemologisnya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan alamiahnya,

berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut (Dedy Mulyana dan Solatun. 2008 : 5)

### b. Jenis Data

#### 1) Data primer

Data primer merupakan data utama yang di buat peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang di teliti, menurut Sugiyono (2012:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat berupa hasil wawancara peneliti kepada informan penelitian.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan



dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informan dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang di teliti. (Sugiyono, 2012 : 225).

### **3. LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan berasal dari kata “*policy*”, dalam arti luas Dye (1975 : 1) dalam Yudiantmaja (2013 : 30) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah (*whatever government choose to do or not to do*). Pendapat Dye tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah dan menyangkut segala sesuatu yang diputuskan untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, yang menyangkut tugas dan fungsi pemerintah.

Winarno (2014:20-21)

mengemukakan pengertian kebijakan dari beberapa ahli diantaranya, menurut Robert Eyestone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan” sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kemudian Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

#### **C. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan (manajemen), menurut Lieper dalam pitana dan Diarta (2009 : 80), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

Berangkat dari teori kebijakan dan Pengelolaan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Arfandi (2015:25) terdapat 5 (lima) variable yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yang diantaranya:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Parawisata yang merupakan sebuah industri multi sektoral yang dimana akan melibatkan banyak *stakeholder* dalam proses pengembangannya, maka dengan demikian pengembangan parawisata dalam hal ini parawisata bahari membutuhkan dukungan atas sebuah kebijakan yang memiliki kejelasan dari apa yang menjadi standar kebijakan serta sasaran yang seperti apa yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut.

Cakupan dari sumber daya didalam teori ini meliputi sumber daya

alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam disini dimaksudkan pada objek-objek yang memiliki daya tarik dan keindahan yang dikemas menjadi sebuah produk wisata. Sedangkan sumber daya manusia disini dimaksudkan pada subjek-subjek atau orang/sekelompok orang sebagai pelaku pelaksana kebijakan.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka dengan demikian yang dimaksudkan sebagai sumber daya alam kebijakan ialah segala sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengelolaan didalam sebuah kebijakan, dalam hal ini objek atau daya tarik parawisata bahari. Sedangkan sumber daya manusia disini dimaksudkan sebagai orang atau sekelompok orang selaku agen pelaksana yang turut serta dalam proses pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan wisata bahari di pantai batu kasah Kabupaten Natuna.

3) Hubungan Antar Organisasi.

Implementasi dari kebijakan pengembangan parawisata melibatkan berbagai pihak sebab parawisata merupakan industri multisektoral. Dari pemahaman disini agar terwujudnya pengelolaan parawisata yang terarah dan dibutuhkan koordinasi antar berbagai pihak atau instansi dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam teori ini mencakup: struktur birokrasi, pola-pola dan norma-norma yang berlaku di lingkup instansi birokrasi, dalam hal ini instansi dinas parawisata. Dengan demikian karakteristik dari instansi dinas parawisata meliputi struktur organisasi dinas parawisata, pembagian kewenangan, hubungan antar unit dalam dinas parawisata, serta hubungan dinas parawisata dengan instansi lain.

5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Selanjutnya, keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Natuna juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial mencakup (dukungan dan pandangan masyarakat Natuna), kondisi ekonomi (kemampuan dan keterbatasan ekonomi), serta kondisi politik mencakup (dukungan dan pandangan para elit politik).

Kondisi sosial berkaitan dengan pandangan, dukungan maupun dengan keikutsertaan masyarakat Natuna dalam proses pengelolaan pariwisata bahari di Natuna, sedangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan sumber dana serta dukungan dana yang dialokasikan pengembangan pariwisata bahari di Natuna, selanjutnya bagian kondisi politik, berkaitan dengan dukungan dari para elit politik dalam proses pengelolaan wisata bahari pantai batu kasah di Kabupaten Natuna.

#### **D. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata menurut Samsuridjal dan Kaelany (1997:11) merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Lebih dari itu pariwisata dengan ragam motivasinya akan menimbulkan permintaan-permintaan dalam bentuk jasa-jasa dan persediaan-persediaan lain. Menurut Soekardijo dalam Purnamawati (2001:50) pariwisata adalah segala dalam kegiatan

dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan pariwisata menurut Robbert dalam Purnamawati (2001:51) adalah aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan, tetapi bukan untuk mencari nafkah maupun menetap (Juramadi Esram 2012:19).

#### **E. Pengertian Wisata Bahari**

Wisata Bahari merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai, atau laut. Wisata bahari adalah suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan, menyelam dengan perlengkapan selam lengkap (Pendit, 1994: 19).

Wisata bahari adalah wisata dan lingkungan yang berdasarkan daya tarik wisata kawasan yang didominasi perairan dan kelautan. Wisata bahari adalah kegiatan untuk menikmati keindahan dan keunikan daya tarik wisata alam di wilayah pesisir dan laut dekat

pantai serta kegiatan rekreasi lain yang menunjang. Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata baik yang dilakukan diatas permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut (R.G Soekadijo, 1996:2).

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **A. Implementasi Kebijakan**

##### **1. Kemitraan**

Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dalam menangani masalah pariwisata yang ada di Natuna merupakan hal yang paling mendasar dimana dalam pengelolaan objek-objek wisata khususnya objek wisata Pantai Batu Kasah yang ada di Desa Cemaga Tengah yang harus dikelola dan dikembangkan dengan serius mengingat daerah Natuna merupakan salah satu wilayah target

pariwisata unggulan. Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis pengelolaan pariwisata telah melakukan berbagai upaya koordinasi dengan berbagai organisasi atau instansi pemerintahan dalam pengelolaan pariwisata bahari Pantai Batu Kasah di Kabupaten Natuna.

Hasil wawancara pada Bapak Toni Yulifandri, S.Pi selaku Kabid Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada Senin 16 Mei 2016 :

“Berbagai bentuk koordinasi telah dilakukan dari berbagai dinas terkait seperti berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum yang kemudian diserahkan kepada kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut”.

Berdasarkan penjelasan diatas berbagai bentuk koordinasi telah dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam bentuk perencanaan dan pemetaan kawasan-kawasan pariwisata yang salah

satunya Pantai Batu Kasah, kemudian melalui koordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam bentuk rencana pembangunan jalan dan jembatan menuju objek wisata Pantai Batu Kasah dari jalan kabupaten sesuai dengan surat permohonan yang di ajukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Tanggal 8 Juli 2013 No : 556/DISPAR/BDP/125, jalan yang akan di bangun  $\pm$  2,5 Km. yang kemudian jalan tersebut akan di lelang dan diberikan tanggung jawab kepada kontraktor yang memenuhi syarat untuk mengerjakan pembangunan jalan tersebut agar dapat di kerjakan dengan sebaik mungkin sebagai bentuk kemitraan antara Dinas Pariwisata dengan Kontraktor.

Implementasi kebijakan dari hubungan antar organisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan surat permohonan yang di ajukan oleh Kepala Dinas Pariwisata mengingat

kondisi jalan menuju Pantai Batu Kasah sangat memperhatikan sehingga Dinas Pekerjaan Umum telah menerina permohonan tersebut pembangunan jalan dan pengaspalan akan direalisasikan pada tahun ini, rencananya pekerjaan akan dimulai pada pertengahan tahun ini dan akan selesai pada akhir tahun ini.

## **2. Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata membutuhkan dukungan anggaran. Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan dibagian awal, kinerja Dinas Pariwisata juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Anggaran dalam pengelolaan dan pembangunan objek wisata Pantai Batu Kasah tidaklah sedikit, Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga instansi lain serta inestor agar pengelolaan objek wisata pantai batu kasah berjalan dengan baik.

Hasil wawancara pada Bapak Toni Yulifandri, S.Pi selaku Kabid Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada Senin 16 Mei 2016 :

“Permasalahan anggaran objek wisata Pantai Batu Kasah kami berusaha akan mengajukan dana dari dana APBD Kabupaten, bisa juga APBD Provinsi, Kementerian melalui dana alokasi khusus, serta kami juga akan menawarkan kepada inpestor asing sehingga untuk membangun dan mengelola pantai batu kasah sesuai dengan DED dan rencana kami selaku badan pelaksana teknis lapangan”.

Selanjutnya hasil wawancara pada Bapak Drs. Syamsul Hilal selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada Kamis 19 Mei 2016 :

“Untuk mendapatkan anggaran APBD provinsi dan Kabupaten serta Kementerian lahan yang akan dibangun harus bersertifikat milik atas nama Pemerintah Daerah ”.

Wawancara di atas menjelaskan anggaran yang akan didapat oleh Dinas Pariwisata untuk pengelolaan dan pembangunan Pantai Batu Kasah ini melalui dana alokasi khusus untuk Dinas

Pariwisata melalui APBD kabupaten dan APBD Provinsi. Dinas Pariwisata akan mengajukan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Pantai Batu Kasah, dan menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Pariwisata. Serta Dinas Pariwisata juga akan menawarkan kepada inpestor asing untuk menanamkan saham melalui kerjasama. Untuk anggaran yang berasal dari kementerian Pariwisata memang memiliki anggaran tersendiri sesuai dengan surat keputusan Diriektur Jendral Pengembangan Detinasi Pariwisata Nomor : 14/KEP/DPDP/XI/2013, Memutuskan Keputusan Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Tentang Penetapan Desa dan Besarannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Desa Wisata Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2014.

Dalam pengimlementasian anggaran baik dari APBD provinsi

maupun kabupaten belum bisa diserahkan ke Dinas Pariwisata untuk pembangunan dan pengelolaan wisata Pantai Batu Kasah seperti yang dilampirkan dalam DED. Lahan untuk pembangunan objek wisata tersebut yakni Pantai Batu Kasah harus dimiliki oleh pemerintah dengan kata lain sertifikat lahan sah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang sekarang masih atas nama kepemilikan masyarakat setempat.

### 3. Sarana-prasarana

Berdasarkan yang dilihat peneliti dilokasi objek wisata Pantai Batu Kasah, belum nampak adanya pembangunan imprastruktur seperti reasort atau penginapan, rumah makan, dan bangunan-bangunan penunjang lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Toni Yulifandri, S.Pi selaku Kabid Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada Senin 16 Mei 2016 :

“Untuk sarana prasarana pembangunan seperti reasort belum di bangun, akan

tetapi kami telah memberikan sarana di pantai batu kasah berupa atribut seperti jong atau bout serta telah kami bentuk Kelompok Sadar Wisata”.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata memang belum membangun bangunan seperti reasort dan perlengkapan lainnya akan tetapi rencana untuk membangun semacam tempat wisata yang eksotis atau memberikan nuansa tersendiri dari Pantai Batu Kasah ini seperti tersedianya infrastruktur seperti reasort, restoran tempat atau area bermain dan lain sebagainya sebagai infrastruktur pendukung masih dalam rencana Dinas Pariwisata yang telah tercantum dalam Detile Engenering Desgen (DED), tetapi dalam hal ini Dinas Pariwisata telah memberikan bantuan berupa pasilitas berupa bout atau jong serta melakukan pelatihan pembuatan Kerajinan, Seni dan Kuliner yang di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata yang di bentuk oleh Dinas Pariwisata. Bantuan tersebut diserahkan

langsung kepada pengurus Kelompok Sadar Wisata Dengan jumlah jounge atau bout sebanyak 20 buah serta bantuan lainnya.

#### **4. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung kegiatan atau program dari Dinas Pariwisata, dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada sebagian masih meragukan program pemerintah khususnya Dinas Pariwisata untuk menjadikan Pantai Batu Kasah ini salah satu target objek wisata unggulan Natuna sebagai mana hasil wawancara dengan Bapak Sarnizar selaku Staff Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada Rabu 18 Mei 2016 :

“Jika ingin menjadikan Pantai Batu Kasah ini sebagai objek wisata unggulan Natuna masyarakat harus siap untuk tidak membuang sampah, bikin rumah di sekitar objek wisata, dan siap bersikap ramah tamah kepada wisatawan”.

Dinas Pariwisata Natuna telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengelola Pantai Batu Kasah sebagai salah satu objek wisata unggulan Natuna, akan tetapi perlu melakukan dan melihat pertimbangan berbagai pihak yang dalam hal ini ialah partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan objek wisata Pantai Batu Kasah, yang berkaitan dengan lahan dan keramahan lingkungan masyarakat setempat berbagai upaya tersebut ialah melakukan pelatihan dalam kelompok masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata, Dinas Pariwisata telah melakukan pelatihan membuat sopernir yang menjadi ciri has Natuna tersendiri, membuat kue, bagaimana berwisata seharusnya dan pelatihan lain seperti menyambut para wisatawan dan merawat tempat-tempat wisata.

Selanjutnya dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan Dinas Pariwisata juga telah melakukan



implementasi dari kondisi sosial seperti Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata dengan berbagai kegiatan yang tujuannya tidak lain ialah membuat tempat wisata aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan nyaman, selain itu juga Dinas Pariwisata juga membuat pelatihan kreatifitas dan lain-lain, akan tetapi sekarang sedikit berkurang karena pengunjung hanya menikmati indahnya pesona alam Pantai Batu Kasah tanpa menikmati pesona lain yang memberikan nuansa yang mempesona seperti bangunan penunjang lainnya.

## **5. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Kemitraan**

Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dinas Pekerjaan Umum (PU) Berbagai bentuk koordinasi yang dilakukan belum terealisasi secara maksimal, karena

koordinasi yang tampak hanya perencanaan dan pemetaan kawasan-kawasan pariwisata unggulan sedangkan akses jalan dan jembatan belum terealisasikan. Hasil koordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum akses jalan dan jembatan akan di bangun secepatnya pada tahun ini.

#### **2. Anggaran**

Untuk anggaran dari Kementerian Pariwisata memiliki anggaran tersendiri sesuai dengan surat keputusan Diriektur Jendral Pengembangan Detinasi Pariwisata Nomor : 14/KEP/DPDP/XI/2013, Memutuskan Keputusan Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Tentang Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Desa Wisata Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2014. Bentuk implementasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk membentuk

Kelompok Sadar Wisata dan bantuan beberapa atribut sarana prasarana penunjang lainnya.

### 3. Sarana Prasarana

Pada objek wisata Pantai Batu Kasah Dinas Pariwisata belum membangun bangunan seperti reasort dan perlengkapan lainnya akan tetapi rencana untuk membangun semacam tempat wisata yang eksotis atau memberikan nuansa tersendiri dari Pantai Batu Kasah ini seperti tersedianya infrastruktur seperti reasort, restoran tempat atau area bermain dan lain sebagainya sebagai infrastruktur pendukung masih dalam rencana Dinas Pariwisata yang telah tercantum dalam DED, tetapi dalam hal ini Dinas Pariwisata telah memberikan bantuan berupa fasilitas berupa boat atau jong yang di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata yang di bentuk oleh Dinas Pariwisata.

### 4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung kegiatan atau program dari Dinas Pariwisata, dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada sebagian masih meragukan program pemerintah khususnya Dinas Pariwisata untuk menjadikan Pantai Batu Kasah ini salah satu target objek wisata unggulan Natuna

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti temui dilapangan, maka peneliti akan memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PEMDA dan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam usaha pengelolaan wisata bahari pantai batu kasah di desa cemaga tengah kecamatan bunguran selatan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat membebaskan lahan Pantai Batu Kasah agar pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata yang

- tercantum dalam Detile Engenering Desgen (DED) dapat terealisasi dengan baik.
2. Memberikan *training* serta pelatihan khusus bagi kelompok sadar wisata seperti membuat pelatihan bagaimana cara memotret dan kecakapan mengelola website yang baik dari potensi yang ada pada objek wisata pantai batu kasah, dan sekaligus bisa di bentuk *guide-guide* yang bisa memberikan informasi kepada pengunjung sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
  3. Dalam Pengelolaan pariwisata perlu adanya daya tarik pada tempat wisata seperti membentuk wisata memancing, berkarang, dan bisa membuat seni pertunjukan seperti *dangkong dancing* dengan melibatkan masyarakat setempat.
  4. Perlu penelitian lanjutan mengkaji tentang potensi yang ada di desa cemaga tengah Kabupaten Natuna yang di ubah menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta : Graha Ilmu
- Arfandi, 2015, “*Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMRAH Tanjungpinang.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Damardjati, R. S. 2007. *Istilah-Istilah Dunia Parawisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Esrarn. Juramadi, 2012. *Menjual Pariwisata Tanjungpinang*. Tanjungpinang kepri: CV Milaz Grafika
- Moleong, Lexy,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyana, Deddy dan Sulatun. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda
- Soekadijo, R. G. 1997. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Subarsono. 2015. *“Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi”*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pendit. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Primadany, dkk. 2013. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 1, 136-139, 09 Februari 2016, 15.00 wib.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Yudiatmaja, W. E. 2013. *Negara, Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing